

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan objek pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam menopang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional, dengan demikian pariwisata tetap berkelanjutan dengan tujuan untuk rekreasi, edukasi, penelitian serta petualangan yang dilakukan secara tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud yaitu setiap pengembangannya harus mempertahankan daya tarik dukungan dan nilai yang dimiliki, sehingga pengelolaan sarana harus dilakukan secara terukur agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan ekologi<sup>1</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha<sup>2</sup>. Hingga saat ini pariwisata menjadi salah satu industri yang terus dikembangkan di seluruh negara maupun daerah sebagai salah satu sumber pendapatan negara atau daerah, sekaligus menjadi

---

<sup>1</sup> Mawar Pranika Hasibuan, Firmansyah Putra, Riri Maria Fatriani, “Peranan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Sarolangun Dalam Pengelolaan Objek Wisata Bukit Tempurung”, Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, 2023.

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

salah satu cara penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Kepariwisata merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pendapatan suatu Negara, yang mana pariwisata juga menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama yang telah ada dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Dengan demikian dapat menjadi daya Tarik yang bisa dijadikan sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>3</sup>

Pariwisata merupakan sebuah kegiatan yang secara langsung bersentuhan dan melibatkan masyarakat sehingga menghasilkan berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dan sekitarnya. Selain itu, pariwisata juga memiliki potensi yang sangat luar biasa apabila pengelolaannya dilakukan secara optimal dan maksimal. Dengan demikian mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dari berbagai aspeknya. Banyaknya manfaat yang ditimbulkan dari sebuah pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat setempat bahkan Negara apabila pariwisata itu dikelola oleh pihak yang tepat.

Sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata harus dikembangkan dengan baik. Maka dari itu diperlukannya upaya dari Pemerintah dalam pengelolaannya. Pengelolaan pariwisata harus

---

<sup>3</sup>Data Wardana, Zainal, dan Arwanto Harimas Ginting, "*Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*", Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, ISSN 2301-6965 : E-ISSN 2614-0241, Vol. 10, No. 1, April 2020, hlm. 211.

terencana secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, wilayah Provinsi Jambi memiliki luas sekitar 49.026 Kilometer (km) persegi dan memiliki jumlah penduduk sekitar 3.631,1 ribu jiwa<sup>4</sup>. Provinsi Jambi juga kaya akan potensi objek wisata, kekayaan objek wisata yang tersebar di dua kota dan Sembilan Kabupaten. Yang mana masing-masing berada di Sungai Penuh di kawasan pegunungan Kerinci, Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi sebagai Ibukota dari Provinsi Jambi itu sendiri.

Provinsi Jambi terus berupaya menjadikan sektor pariwisata daerah berbasis alam dan kearifan lokal sebagai sumber pendapatan daerah. Candi Muaro Jambi yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi, Geopark Merangin berlokasi di Kabupaten Merangin, Danau Kaco serta Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci, merupakan pariwisata yang menjadi ciri khas dari Provinsi Jambi. selain itu potensi wisata di Kota Jambi cukup beragam mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan kerajinan<sup>5</sup>.

Kota Jambi yang merupakan ibukota dari Provinsi Jambi mempunyai berbagai tempat potensi wisata. Beberapa tempat wisata yang ada di Kota Jambi

---

<sup>4</sup>Provinsi Jambi Dalam Angka 2023,  
<https://jambi.bps.go.id/publication/2023/02/28/c08fe50438279b275b30fcf6/provinsi-jambi-dalam-angka-2023.html>, Diakses Pada 6 Maret 2023, Pukul 13.13 WIB.

<sup>5</sup>Muhammad Farid Ma'ruf, Badrudin Kurniawan, Rizky Purna Aji Galih Pangestu, "*Desa Wisata : Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)*", Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim, Vol. 7, No. 2, Oktober 2017, hlm. 194.

seperti Danau Sipin, Kampoeng Radja, Gentala Arsy yang menjadi *icon* Provinsi Jambi, tempat wisata yang menjadi edukasi hewan yaitu Taman Rimbo Zoo, Museum Siginjau merupakan tempat wisata sejarah dan tempat wisata buatan berbasis alam lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 Pasal 60 menjelaskan tentang kawasan peruntukan wisata yang mana Danau Sipin menjadi salah satu tujuan untuk pengembangan wisata di Kota Jambi<sup>6</sup>. Dalam pemanfaatan pengembangan kawasan peruntukan wisata, Pemerintah Kota Jambi berupaya menjadikan kawasan Danau Sipin sebagai salah satu objek wisata yang ada di Kota Jambi dengan tidak menghilangkan kerarifan lokal yang ada pada daerah tersebut.

Pengembangan kawasan wisata Danau Sipin yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam diharapkan mampu menopang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta Kesejahteraan Masyarakat sekitar Kawasan Danau Sipin. Danau Sipin adalah sebuah danau yang berada di tengah-tengah Kota Jambi yang tidak semua daerah memilikinya. Danau Sipin merupakan sebuah danau yang sangat terkenal di Jambi yang mana Kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi berlokasi di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Danau Sipin memiliki panjang sekitar 4.500 meter dengan lebar kurang lebih mencapai 300 meter serta kedalaman danau 5 hingga 8 meter<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033.

<sup>7</sup>Ihsan Mohammad, Rosyid Gray Yuesa, Siregar Ade Perdana, “*Strategi Positioning dan Citra Destinasi Objek Wisata Air Danau Sipin Jambi*”, Jurnal Manajemen dan Sains, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 205.

Kawasan Wisata Danau Sipin memiliki berbagai potensi seperti keindahan alam yang sangat Indah dan alami dengan kondisi air danau yang cukup tenang. lokasinya yang berada ditengah kota sangat strategis dan juga memiliki sarana prasarana mendukung seperti askes jalan yang memadai serta ketersediaan lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam dan buatan. Salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi dan menjadi ikon Kota Jambi ialah Danau Sipin. lokasinya yang berdekatan dengan kantor Gubernur Jambi dan berada di pusat Kota dan mudah dijangkau menjadi tujuan untuk dikunjungi dan menghabiskan akhir pekan bersama sanak keluarga.

Untuk pengelolaan Kawasan Danau Sipin hingga saat ini belum memiliki pengelolaan yang resmi sehingga akses untuk masuk ke dalam objek wisata Danau Sipin saat ini tidak dikenakan biaya. Pengunjung ataupun wisatawan hanya dikenakan biaya parkir dan biaya sewa fasilitas untuk menikmati wisata air.

Dibalik keindahan alam yang disuguhkan oleh Danau Sipin, terdapat fakta menarik yang mana pada awalnya Kawasan Danau Sipin Kota Jambi sebelum dijadikan objek wisata merupakan sebuah perkampungan yang padat. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan ini, pemerintah meluncurkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mempercepat mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100” yang artinya 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Dengan diluncurkannya program ini tentunya memiliki tujuan untuk

meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan adanya program KOTAKU di Kawasan Danau Sipin, Pemerintah akan melakukan pengembangan pembangunan untuk menjadikan kawasan ini menjadi sebuah tempat destinasi wisata dan ekowisata di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi menerima bantuan dana dari Kementerian PUPR guna pelebaran jalan di sekitar Danau Sipin Kota Jambi. Bantuan ini diberikan untuk menunjang Danau Sipin yang akan dijadikan sebagai satu diantara ikon wisata di Kota Jambi.

Selain itu fakta menarik lainnya yaitu Danau Sipin yang dahulunya di kenal dengan kampung narkoba kemudian diubah menjadi kampung wisata Danau Sipin<sup>8</sup>. sebelum menjadi kawasan wisata, banyak masyarakat luar yang takut untuk masuk ke wilayah Danau Sipin, ini merupakan salah satu penyebab sulitnya ekonomi masyarakat karena banyak pelaku usaha yang tidak mau menerima orang yang berasal dari Legok dan Pulau Pandan untuk bekerja. Dengan beriring nya waktu, hal tersebut mulai berangsur luntur sehingga banyak masyarakat tidak takut lagi memasuki kawasan Danau Sipin karena adanya pembangunan yang menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu ikon wisata Kota Jambi.

Pada tahun 2017 di masa kepemimpinan Bapak Syarif Fasha yang menjabat sebagai Walikota Jambi (2013-2023). Pemerintah melihat bahwa Danau Sipin memiliki sumber daya alam yang jarang dimiliki oleh daerah lain yaitu adanya

---

<sup>8</sup>Samsul Ma'arif, "Danau Sipin, Danau Elok Berbalut Kearifan Lokal", <https://www.nativeindonesia.com/danau-sipin/>, Diakses pada 5 Maret 2024, Pukul 18.10 WIB.

Danau yang berada di tengah-tengah Kota<sup>9</sup>. Dengan begitu Pemerintah berinisiatif untuk menjadikan Danau Sipin ini menjadi sebuah kawasan Objek Wisata Kota Jambi tanpa menghilangkan budaya serta nilai-nilai kearifan lokalnya. Pembangunan di Kawasan Danau Sipin di mulai dengan dibangunnya area *Jogging Track*.

Selain pembangunan *Jogging Track*, Pemerintah Daerah Kota Jambi turut melanjutkan inisiatif pembangunan berbagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan kualitas dan daya Tarik kawasan wisata Danau Sipin. langkah tersebut meliputi peningkatan aksesibilitas dengan pembangunan area parkir yang memadai, memastikan kenyamanan pengunjung serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya Pemerintah membangun fasilitas umum seperti toilet dan tempat istirahat yang bersih dan terawat, sehingga mampu meningkatkan pengalaman pengunjung selama berada di kawasan tersebut. Dengan adanya pengembangan objek wisata di Kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi diharapkan mampu memberikan dampak bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal tersebut.

Kawasan wisata Danau Sipin dikelola oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi selaku pengelola wisata dan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. adanya campur tangan dari Pemerintah Provinsi

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Padjeriosnop, ST., MM. selaku Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, Pada 24 Oktober 2023, Pukul 08.05 WIB.

dikarenakan adanya aset milik Pemerintah Provinsi Jambi disekitar kawasan wisata Danau Sipin yang dibangun oleh Pemerintah Kota Jambi, maka dari itu kawasan wisata Danau Sipin terbagi menjadi dua yaitu milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi.

Akan tetapi dalam pengelolaan di bidang pariwisata juga tidak terlepas dari adanya sebuah masalah, seiring dengan perkembangannya berbagai permasalahan yang dihadapkan dari mulai masalah sosial ekonomi, bencana, hingga tata kelola yang rentan akan konflik kepentingan<sup>10</sup>. Lemahnya manajemen pengelolaan objek wisata dapat menimbulkan dampak dari berkurangnya jumlah minat pengunjung menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata. Oleh sebab itu, sangat diperlukannya pengelolaan objek wisata yang baik dalam membantu aktifitas bagi wisatawan yang berkunjung ke sebuah objek wisata.

Adanya klaim bahwa pengelolaan kawasan Danau Sipin merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi juga berdampak pada progress pengembangan kawasan Danau Sipin, yang mana dapat memicu munculnya ego sektoral terhadap pengembangan program pengelolaan wisata Danau Sipin. Selama penelitian dilaksanakan, dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang terawat seperti fasilitas listrik yang kurang memadai, minimnya tempat sampah, selain itu minimnya jumlah lahan untuk masyarakat yang ingin berjualan makanan dan

---

<sup>10</sup>Faizah B, M. Yusuf. "Konflik Dalam Kolaborasi Pengelolaan Objek Wisata (Studi Kasus Pengelolaan Danau Sipin Kota Jambi), Laporan Akhir Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi, Desember 2020.



minuman untuk para pengunjung. Dengan demikian ini menjadi keluhan wisatawan yang akan berkunjung di kawasan wisata Danau Sipin<sup>11</sup>.

Konflik yang terjadi di kawasan wisata Danau Sipin. Konflik dalam pengelolaan parkir yaitu terjadinya perebutan pada pengelolaan lahan parkir hal ini disebabkan karena ketidakjelasan regulasi pengelolaan parkir sehingga menyebabkan tindak kekerasan sesama masyarakat lokal kawasan wisata Danau Sipin Kota Jambi<sup>12</sup>. Selain itu timbulnya sifat saling iri yang terjadi antara pemilik modal kecil dan pemilik modal besar di masyarakat yaitu pelaku jasa perahu motor dan jasa perahu kecil, konflik lainnya seperti konflik pengelolaan sampah. Sampah yang menumpuk dapat merusak estetika danau serta menimbulkan dampak negative bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilihat kembali upaya dari pihak yang ikut terlibat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Kawasan Wisata Danau Sipin melalui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Danau Sipin tidak terlepas dari peran Pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam perencanaan penggunaan lahan dan infrastruktur yang berkaitan dengan jalan serta keperluan lainnya seperti listrik, air dan pembuangan sampah serta perencanaan keamanan yang merangkul keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan.

---

<sup>11</sup>Yudha Eka Nugraha, Elisabet Rambu Lika Enga, “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Studi kasus di Pantai Oetune Kabupaten Timor Tengah Selatan”, *Jurnal Media Wisata*, ISSN : 16935969, EISSN : 26858436, Volume 19, Nomor 1, Mei 2021, hlm 69.

<sup>12</sup><https://kerincitime.co.id/seorang-warga-babak-belur-lantaran-rebutan-lahan-parkir-di-danausipin.html>. Diakses 7 September 2023.

Selain itu, Pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti Flora dan Fauna yang langka, air, tanah dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Maka dari itu, Pemerintah harus menyusun dan menyiapkan suatu konsep pengembangan dalam pengelolaan di sektor pariwisata.<sup>13</sup>

Pengelolaan Kawasan Wisata Danau Sipin menjadi destinasi objek wisata di Kota Jambi tentunya melibatkan berbagai pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelola objek wisata ini diantaranya Dinas Pariwisata Provinsi Jambi sebagai pengelola objek wisata Danau Sipin di Kecamatan Telanaipura, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola dibidang lingkungan hidup seperti menjaga kebersihan taman dan danau selanjutnya Pemerintah Kota Jambi membangun sarana fisik danau seperti *jogging track*, Anjungan, Jembatan, *Drainase*, Lokasi Parkir, Jalan, Toilet, dan Taman Tematik (*Skateboard dan Climbing*).<sup>14</sup>

Pengelolaan kawasan wisata Danau Sipin selain dikelola oleh pihak pemerintah juga melibatkan masyarakat melalui organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pulau Kambang. POKDARWIS ini membawahi berbagai kegiatan wisata yang ada di kawasan wisata Danau Sipin. Adapun kegiatan wisata nya yaitu wisata air berupa perahu ketek dan perahu motor, serta kuliner. Semua kegiatan wisata tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar kawasan

---

<sup>13</sup>Siska Yuliana, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Danau Teluk Gelam Di Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, 2018.

<sup>14</sup>Dinas Komunikasi dan informatika kota jambi, “Danau Sipin konsep wisata ekologis danau alami di Kota Jambi”, <https://jambikota.go.id/new/2019/02/27/danau-sipin-konsep-wisataekologis-danau-alami-di-kota-jambi/>, 2018. Diakses pada 14 september 2023.

wisata Danau Sipin sebagai anggota dan pengurus dari POKDARWIS Pulau Kembang<sup>15</sup>.

Pada dasarnya pengelolaan objek wisata menekankan pada prinsip-prinsip yang berkaitan pada kelestarian lingkungan alam, komunikasi dan nilai-nilai sosial. Pengelolaan kawasan wisata Danau Sipin lebih menekankan pada fungsi pengkoordinasiannya. Fungsi ini dianggap sebagai salah satu fungsi dari pengelolaan untuk menggambarkan upaya mengkoordinasi sumber daya manusia, keuangan serta barang fisik untuk mencapai tujuan dari objek wisata Danau Sipin. Proses pengelolaan Kawasan wisata Danau Sipin terbagi menjadi dua yaitu dikelola oleh Pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi. Dengan demikian membuat beberapa pengembangan atau pengelolaan terhambat karena menimbulkan tumpang tindih akibat dari adanya perbedaan pengelolaan tersebut.

Adanya permasalahan yang terjadi pada kawasan wisata Danau Sipin, baik dari segi pengelolaan maupun pengkoordinasian memerlukan upaya Pemerintah guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan serta pengembangan pada kawasan wisata Danau Sipin Kota Jambi. Untuk mengkaji lebih dalam terkait masalah pengelolaan pariwisata yang berbeda, maka perlu dilihat pada penelitian terdahulu. Dimana terdapat beberapa penelitian membahas mengenai pengelolaan pariwisata akan tetapi dari penelitian yang dilakukan mempunyai sudut pandang atau paradigma dan ciri khas masing-masing dalam fokus penelitiannya.

---

<sup>15</sup>Sherin Yulia Hutami, “Analisis *Collaborative Governance* Dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi”, *Skripsi*, Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, 2022.

**Tabel. 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti                                          | Judul Penelitian                                                                                                                           | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Yudha Eka Nugraha, Elisabet Rambu Lika Enga, 2021 | Peran pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Studi Kasus di pantai Oetune Kabupaten Timor Tengah Selatan. | Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data yang didapat melalui hasil observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literature. Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan upaya-upaya Pemerintah dalam mengelola Daya Tarik Wisata Pantai Oetune yang mulai berkembang melalui peran dari Pemerintah dalam pengelolaan destinasi wisata alam yang merupakan salah satu atraksi wisata yang sedang diminati di Kabupaten Timor Tengah. <sup>16</sup> |
| 2. | Elsa Ayu Navila, 2023                             | Respon Pengunjung Taman Danau Sipin Terhadap Fasilitas Taman Wisata Danau Sipin Kota Jambi                                                 | Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam menyediakan fasilitas taman Danau Sipin yaitu tetap berorientasi pada lingkungan yang sehat, serasi dan teratur dengan penataan lingkungan wisata di sekitar Danau Sipin ini diharapkan dapat mendukung fungsi dan kebijaksanaan yang ditetapkan pada lokasi tersebut <sup>17</sup> .                                      |
| 3. | Arizka Fauziah Usman, 2023                        | Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Sipin Di Kota Jambi                                                           | Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Adapaun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi masih kurang berjalan dengan baik salah satu faktornya yaitu tidak tersedianya ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan saran, kritik dan keluhan yang dirasakan. <sup>18</sup>                                                                                                 |

<sup>16</sup>Yudha Eka Nugraha, Elisabet Rambu Lika Enga, “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Studi kasus di Pantai Oetune Kabupaten Timor Tengah Selatan”, *Jurnal Media Wisata*, ISSN : 16935969, EISSN : 26858436, Volume 19, Nomor 1, Mei 2021, hlm 70.

<sup>17</sup>Elsa Ayu Navila, “Respon Pengunjung Taman Danau Sipin Terhadap Fasilitas Taman Wisata Danau Sipin Kota Jambi”, *Skripsi*, Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, 2023

<sup>18</sup>Arizka Fauziah Usman, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Sipin Di Kota Jambi”, *Skripsi*, Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, 2023

|   |                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Fanya Febriyanti, 2022 | Peran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Destinasi Wisata Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. | Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi pengelolaan terhadap destinasi wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan destinasi wisata sudah banyak yang dilakukan, seperti melakukan promosi terhadap objek wisata, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, serta meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana. <sup>19</sup> |
| 5 | Armela Shintani, 2020  | Relasi Pemerintah Daerah dan Swasta Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata di Kelurahan Sei Gohong                                | Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu tentang hubungan atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta dalam pengelolaan destinasi wisata di Kelurahan Sei Gohong. <sup>20</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

berdasarkan tabel diatas bahwa keempat penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan satu penelitian terdahulu membahas pengelolaan objek wisata yang dilakukan secara kemitraan bersama pihak swasta. Namun terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu pengelolaan objek wisata yang dilakukan hanya berfokus pada satu pihak saja dan lebih membahas

<sup>19</sup>Fanya Febriyanti, "Peran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Destinasi Wisata Di Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Diploma Thesis*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

<sup>20</sup>Armela Shintani, "Relasi Pemerintah Daerah dan Swasta Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata di Kelurahan Sei Gohong", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, ISSN : 2089-6123, e-ISSN : 2684-9119, Volume 9, Issue 2, 2020.

indikator dalam objek wisata. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada Upaya terkait Pengelolaan objek wisata di kawasan wisata Danau Sipin Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DANAU SIPIN KOTA JAMBI”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Dalam Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi?
2. Bagaimana Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Tempatan Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata danau sipin kota jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata danau sipin kota jambi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak yang memerlukannya :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya mampu menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi penelitian selanjutnya serta direkomendasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terkhusus bagi Lembaga atau Instansi Pemerintahan.

## **1.5 Landasan Teori**

Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dan tepat agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut teori yang peneliti gunakan :

### **1.5.1 Kebijakan Publik**

Menurut Woll, kebijakan publik yakni sejumlah aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut James E. Anderson memberikan pengertian bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Adapun implikasi dari kebijakan pemerintah yaitu:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau memiliki tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan Pemerintah
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik yang diambil bias bersifat positif dalam artian merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan Pemerintah agar tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan Pemerintah setidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Kebijakan publik merupakan sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah. Menurut Anderson Kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai proses management, yang mana didalamnya terdapat tahapan serangkaian kerja pejabat publik<sup>22</sup>. James E. Anderson mengartikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.<sup>23</sup>

Kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuan

---

<sup>21</sup>Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, (Lukman Offset, Yogyakarta: 2023),2.

<sup>22</sup>Taufiqurakhman, *kebijakan Publik PendelegasianTanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), hlm. 13

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm. 13.



tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Adapun proses Kebijakan Publik menurut James E. Anderson yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Agenda Setting, fokus pada tahap ini yaitu bagaimana masalah-masalah bias dijadikan kebijakan publik yang dispesifikasikan dan di identifikasikan. Mengapa hanya beberapa masalah dari semua masalah yang ada, yang dapat menerima pertimbangan oleh pembuat kebijakan yang membutuhkan sebuah pemeriksaan dari agenda seting.
2. Formulasi, pada tahap ini meliputi berbagai macam tindakan berupa pembuatan dan pengidentifikasian, seringkali disebut pilihan untuk memecahkan atau memperbaiki masalah publik.
3. Adopsi, tahap ini membahas tentang memutuskan pilihan yang dimaksud, termasuk mengambil tindakan yang digunakan untuk mengatasi masalah.
4. Implementasi/Pelaksanaan, pada tahapan ini perhatiannya pada apa yang terselesaikan untuk melaksanakan atau menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi, kegiatan ini memerlukan maskud menentukan apakah sebuah kebijakan terpenuhi.<sup>24</sup>

### **1.5.2 Pengelolaan Kawasan Wisata**

---

<sup>24</sup>James E. Anderson, *Public Policimaking-Sixth Edition*, (Houghton Miffilin Company, Boston.2006) hlm. 3-4.

Pengelolaan berasal dari kata “kelola”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju serta bertanggungjawab atas suatu pekerjaan tertentu. Kata “Pengelolaan” bisa disamakan dengan Manajemen yang memiliki arti pengaturan atau pengurusan.

Menurut Hayyun, Pengelolaan ialah suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan dan pencapaian tujuan. Dalam pengelolaan pariwisata Pemerintah memiliki peran seperti melakukan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan.<sup>25</sup>

Fungsi pengelolaan secara garis besar bisa dipahami bahwa semua kegiatan manajemen tidak bisa terlepas dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Adapun fungsi pengelolaan dapat diuraikan sebagai berikut<sup>26</sup>:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu suatu proses kegiatan, rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan berarti suatu kegiatan yang memiliki hubungan dengan usaha dalam merumuskan program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang

---

<sup>25</sup>Meizannur, “Analisis Pengembangan Obyek Wisata Alam di Restot Balik Bukit Pekon Kubu Perahu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan”, *Skripsi*, Jurusan Pertanian Universitas Lampung, 2014.

<sup>26</sup>BAB II, “Pengelolaan Kawasan Wisata Serta Dampak Ekonomi Dan Sosial Budaya Masyarakat”, hlm 24-27.

akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan. Selain itu perencanaan harus bersifat factual, rasional, fleksibel, berkesinambungan dan dialektis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat suatu perencanaan yaitu:

- 1) Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan;
- 2) Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang;
- 3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat;
- 4) Mengembangkan rencana dan menjabarkannya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yaitu suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan didalam sebuah organisasi tugas serta fungsinya juga disatupadukan. Dalam proses ini dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara detail dan terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga terintegrasi koneksi kerja yang sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pengorganisasian terjadi karena suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan itu terasa terlalu berat jika ditangani oleh satu orang saja. Dengan demikian dibutuhkan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif.<sup>27</sup>

Hal-hal yang dilakukan dalam pengorganisasian yaitu sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>George R. Terry, "Prinsip-Prinsip Manajemen", Terj. S, mith, hlm 73.

- 1) Penerimaan fasilitas, perlengkapan dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.
- 2) Pengelompokkan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang teratur.
- 3) Pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi.
- 4) Penentuan metode kerja dan prosedurnya.
- 5) Pemilihan, pelatihan dan pemberian informasi kepada staf.

c. Penggerakkan (*Actuating*)

*Actuating* merupakan suatu upaya untuk menggerakkan seluruh anggota kelompok agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun hal-hal yang terdapat didalam *Actuating* yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan saat awal pelaksanaan rencana kerja;
- 2) Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan;
- 3) Pemberian motivasi para pekerja untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
- 4) Pengkomunikasian seluruh arah pekerjaan dengan semua unit kerja;
- 5) Pembinaan para kerja;
- 6) Peningkatan mutu dan kualitas kerja;
- 7) Pengawasan kinerja dan moralitas pekerja.

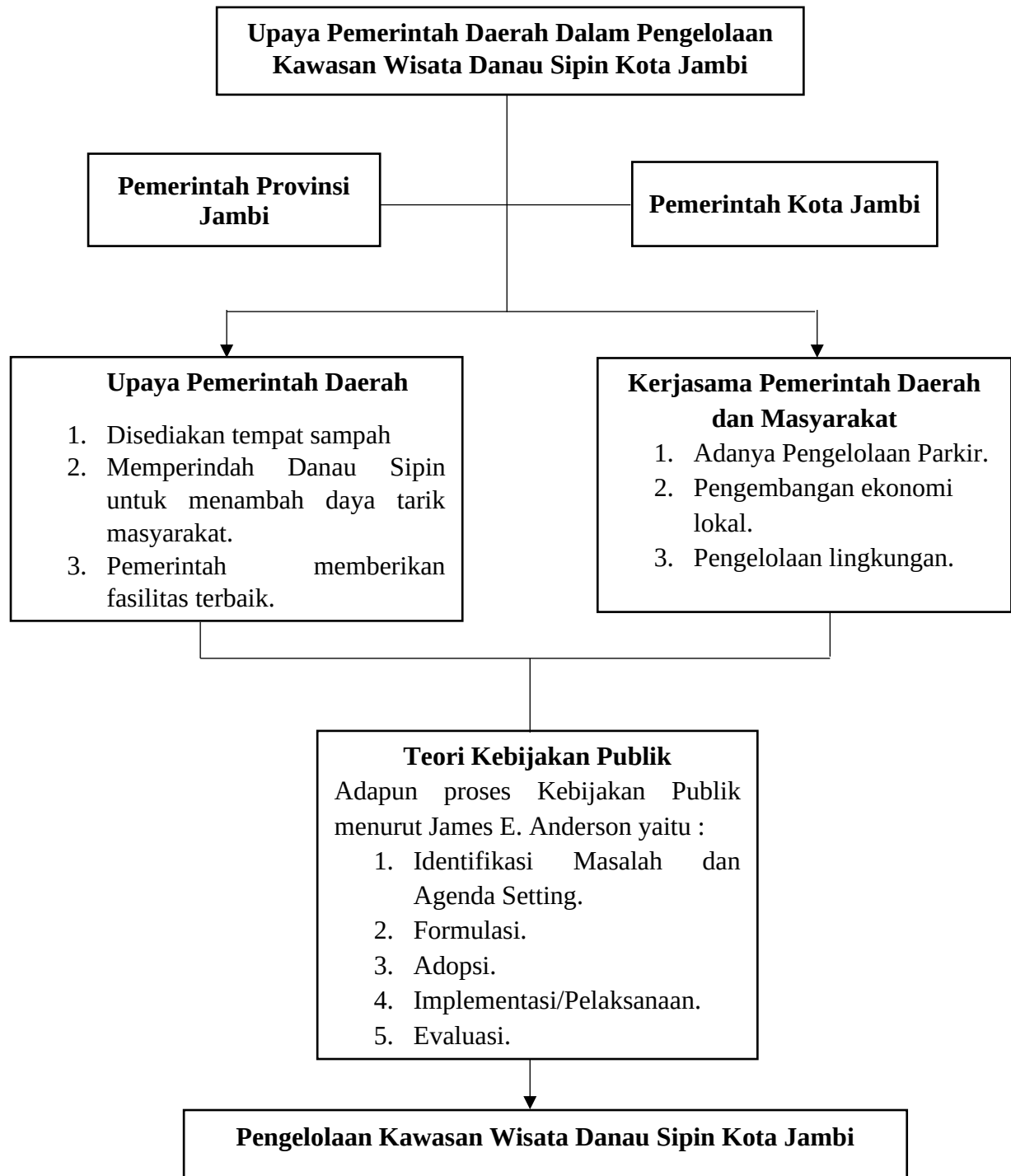
d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengendalian merupakan suatu kegiatan yang bersifat mengawasi dan mengatur bagaimana semua tugas dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal. Pengendalian bisa dilakukan secara vertikal maupun horizontal, yang artinya atasan dapat melakukan pengawasan kepada bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya.

*Controlling* terdiri dari:

- 1) Penelitian terhadap hasil kerja sesuai dengan rencana/program kerja;
- 2) Pelaporan hasil kerja dan pendataan berbagai masala;
- 3) Evaluasi hasil kerja dan *problem solving*

### 1.6 Kerangka Pikir



## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Peneliti akan melakukan penelitian dengan jenis dasar (basic research). Yang mana bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui (Suriasumantri,1985)<sup>28</sup> yang maknanya output dari penelitian ini bukanlah pemecahan masalah-masalah praktis, melainkan menjadi dasar dalam penyelesaian suatu permasalahan praktis. Peneliti akan menjelaskan sejauh mana keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan wisata danau sipin yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat sekitar.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi Penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu di Kawasan Wisata Danau Sipin yang berlokasi di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi selaku pengelola Kawasan Wisata Danau Sipin Kota Jambi.

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini digunakan sebagai batasan masalah untuk membatasi studi dalam penelitian. Fokus penelitian ini mengungkapkan data yang akan dikumpulkan dan dalam pelaksanaannya bisa menambah, memperkuat serta menggeser fokus penelitian. Fokus penelitian ini pada Upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan wisata danau sipin Kota Jambi.

---

<sup>28</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: ALFABETA,2013), hlm 4.

#### 1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara observasi dan wawancara. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung ke lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, internet serta informasi dari berita-berita atau media massa yang relevan dengan fokus penelitian.

#### 1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan yaitu *Purposive Sampling* yang mana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas. Tidak menutup kemungkinan jika peneliti menggunakan teknik *snowball* yaitu bertambahnya informan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan penelitian di lapangan<sup>29</sup>. Informan yang akan menjadi sumber informasi bagi penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bapak Patjerosnop, S.T sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.
2. Bapak Zamzami. sebagai Kasi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Op.Cit.* hlm. 218-219



3. Bapak Syargawi sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
4. Bapak Khairul sebagai Penyuluh Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
5. Bapak John Herman sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pulau Kembang Jambi
6. Masyarakat Kota Jambi seperti wisatawan yang telah berkunjung ke kawasan wisata danau sipin. sebagai sampel, peneliti akan melakukan wawancara kepada dua hingga tiga wisatawan yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini.

#### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengambilan data penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu<sup>30</sup>. Dalam melakukan wawancara peneliti memakai jenis wawancara semi-struktur, yang dimaksud dengan wawancara semi-struktur ialah jenis wawancara ini sudah termasuk kedalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam melakukan wawancara pelaksanaannya bisa lebih bebas dibandingkan dengan wawancara struktur. Tujuan dari wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan dan mendapatkan permasalahan secara

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 137.

yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dan diminta pendapat serta ide-idenya.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila telah sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan serta dicatat secara sistematis, dan bisa dikontrol keandalan (Reliabilitas dan kesahihan Validasinya)<sup>31</sup>. Observasi merupakan salah satu cara yang menitikberatkan pada pengamatan langsung di lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan melihat secara pasti terkait Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Wisata danau Sipin Kota Jambi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan metode data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bahan dokumen terbagi dalam beberapa jenis, yakni otogiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, *memorial*, *klipping*, dokumen pemerintah atau swasta, data *server* dan *flashdisk* data tersimpan di *website* dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Dokumen ini bisa berupa dokumen publik misalnya koran, makalah, laporan kantor. Ataupun dokumen privat seperti e-mail, buku harian, diari, surat. Dokumen yang dimaksud yaitu materi ataupun data informasi yang bisa mendukung pemenuhan data kepenulisan.

---

<sup>31</sup>Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara,2009), hlm. 52.

<sup>32</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), hlm. 33.

### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Bogdan mendefinisikan bahwa analisis data ialah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga bisa mudah untuk dipahami sehingga semuanya bisa diinformasikan kepada orang lain<sup>33</sup>. Adapun cara untuk menganalisis data terdiri dari tiga cara yaitu :

- Reduksi Data, yaitu dengan cara merangkum, memilah dan memilih hal-hal pokok yang sesuai pada fokus penelitian.
- Paparan Data (Data Display), menyajikan data yang telah dipilih dalam bentuk konseptual matriks dan grafik
- Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, merupakan tahap akhir proses pengumpulan data. Pengambilan keputusan melalui data yang diperoleh, dianalisis dan diseleksi sehingga menghasilkan kesimpulan.

### 1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi adalah metode mendapatkan suatu data penelitian dengan menggunakan metode ganda. Keabsahan data yaitu teknik pengujian data yang menggunakan sesuatu lain diluar data itu sendiri untuk melakukan pengecekan dan perbandingan dari data tersebut<sup>34</sup>. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik mempunyai kekurangan dan kelebihan tersendiri, dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih terpercaya.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 244.

<sup>34</sup>Bachtiar S., *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal teknologi pendidikan, 2010.

Terdapat empat tipe Triangulasi, akan tetapi peneliti hanya menggunakan tiga tipe triangulasi yakni:

1. Triangulasi Data, yakni penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian.
2. Triangulasi Peneliti, yakni penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian.
3. Triangulasi Teori, yakni penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Pahrudin dkk., *Buku Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 2017, hlm. 51.